

STRATEGI MITIGASI DAMPAK NEGATIF POLITIK IDENTITAS SEBELUM DAN SESUDAH PEMILU

Mansurni Abadi^a, Cenruang Alung^b, Iman Permadi^c, Yana Schova^d

^aInstitut Kajian Etnik Universitas Kebangsaan Malaysia, Bandar Baru Bangi, Malaysia

^bSekolah Tinggi Ilmu Komputer, Informatika, dan Media Universitas Teknologi Mara, Shah Alam, Malaysia

^cProgram Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada, Kabupaten Sleman, Indonesia

^dDepartemen Teori dan Sejarah Ilmu Politik Universitas Ivan Franko Lviv, Lviv, Ukraina

E-mail: p103027@siswa.ukm.edu.my

ABSTRAK

Dalam praktiknya, politik identitas bagaikan dua mata pisau: ia dapat menjadi positif maupun negatif. Di Indonesia, tren isu politik identitas kian menguat sehingga memitigasi akumulasi negatifnya menjadi niscaya. Artikel ini fokus untuk membedah tanda-tanda, penyebab, dan konsekuensi negatif dari politik identitas sebelum dan sesudah Pemilihan Umum (Pemilu) dengan menggunakan refleksi kritis sebagai paradigma dan tinjauan literatur maupun wawancara sebagai metode. Berdasarkan penelitian kami, ada tiga fenomena yang menunjukkan politik identitas ke arah yang negatif: 1) identitas yang dipersenjatai (*weaponized identity*); 2) siberbalkanisasi *cyberbalkanization/splitinternet*; 3) dan menguatnya konservatisme di ranah politik. Selain itu, ada enam penyebab terjadinya masalah ini meliputi, normalisasi budaya partisan dalam konteks politik sehari-hari, marginalisasi, isu kepercayaan, munculnya pandangan ekstremis dari ruang publik, adanya aktor politik, yang melegitimasi dan menyebarkan kebencian secara terorganisir, dan literasi politik yang lemah. Konsekuensinya, suasana demokrasi Indonesia sebelum dan sesudah Pemilu akan penuh dengan ketegangan etnis-agama, hoaks, pelintiran kebencian, dan ketidakpercayaan yang dapat menyebabkan polarisasi, kerusuhan, dan populisme. Di akhir, penelitian ini juga mengartikulasikan delapan cara untuk memitigasi dampak negatif dari identitas politik sebelum dan sesudah Pemilu.

Kata Kunci: Mitigasi dampak negatif, Politik identitas, Pemilu Indonesia.

MITIGATION STRATEGIES FOR THE NEGATIVE IMPACT OF IDENTITY POLITICS BEFORE AND AFTER INDONESIA GENERAL ELECTION

ABSTRACT

Practically, identity politics has a two-edged sword: it can be positive and negative. In Indonesia, the trend of identity politics is growing stronger, which makes it necessary to mitigate its negative consequences. This article aims to dissect the signs, causes, and negative consequences of identity politics before and after the General Elections (Pemilu) by employing critical reflection as a paradigm and using literature review and interviews as methods. This research finds that there are three phenomena that indicate the negative direction of identity politics: 1) weaponized identity; 2) cyberbalkanization/split internet; 3) and the strengthening of conservatism in the political realm. Additionally, there are six causes contributing to these issues, including the normalization of partisan culture in everyday politics, marginalization, trust issues, the emergence of extremist views in public spaces, political actors who legitimize and organize the spread of hatred, and weak political literacy. Consequently, Indonesia's political dynamic before and after the election was

full of ethnics-religious tension, hoax, hate spin, and distrust that can cause polarization, riots, as well as populism. This also found eight ways to mitigate the negative impact of political identity before and after the election.

Keywords: *Mitigation strategy the negative impact, Identity politics, Indonesia general election*

PENDAHULUAN

Menurut kajian Supratikno (2022), politik identitas yang tidak terkendali dapat mengakibatkan konflik SARA, fundamentalisme dan radikalisme agama, serta manuver politik yang penuh propaganda kebencian terhadap pihak lain. Hal senada juga diingatkan oleh Akbar Faisal (2022) bahwa, jika politik identitas yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan terpecahnya masyarakat, pengkotakan kepentingan, diskriminasi, dan manipulasi politik. Isu politik identitas menjadi perbualan dan perdebatan hangat dalam dunia modern, terutamanya semenjak Huntington menulis "*Clash of Civilizations?*" pada tahun 1993.

Penggunaan identitas dalam politik memang tidak sepenuhnya negatif asalkan mengedepankan moralitas politik tetapi jika hal ini saja hilang yang terjadi selanjutnya adalah sebuah permasalahan seperti hadirnya antagonisme sosial akibat dari permainan identitas untuk kepentingan elektrol semata. Laclau dan Mouffe mengistilahkannya sebagai *political frontiers* atau ambang batas hegemoni politik, di mana setiap aktor politik memahami dan menggunakan identitas mereka melalui relasi yang antagonistik (De Toffoli, 2022; Kazharski, 2019).

Kondisi ini menurut Nawir dan Mukramin (2019) jika terus dipelihara sebelum, selama, bahkan sesudah Pemilu malah akan memunculkan banyak konflik sosial dalam skala besar maupun kecil yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi jika kita cermati, politik identitas yang selama ini dipraktikan memang membahayakan karena telah membagi masyarakat menjadi dua kubu yang saling bertentangan dan terus terpelihara selepas Pemilu. Maka menjadi wajar, jika selanjutnya yang terjadi adalah timbulnya serangkaian gejala negatif seperti mengecilkan peranan pihak lain, ketidakpercayaan terhadap pihak yang terpilih dan penyelenggara Pemilu (KPU), intoleransi, persekusi, budaya mengolok-olok hanya karena beda pilihan, hingga sampailah pada upaya yang menggugat Pancasila dan ketertiban umum.

Dalam konteks negara yang plural seperti Indonesia, politik identitas dalam demokrasi yang seharusnya mempersatukan sebagaimana yang di contohkan oleh para guru bangsa sebelum dan pada awal kemerdekaan itu malah bergerak kearah yang mengancam persatuan. Apalagi dengan kehadiran media sosial (medsos) yang memiliki penetrasi besar, yang mana pada tahun 2021 saja sudah mencapai 73.7 % atau setara dengan 204.7 Juta dari 277.7 juta jiwa (We Are Social & HootSuite, 2021). Besarnya penetrasi medsos di Indonesia tentu menjadikan medsos digunakan sebagai

alat yang paling efektif dan strategis” untuk mendulang, mempertahankan, dan sembari mengorganisir dukungan.

Namun di satu sisi, penggunaan medsos dalam politik juga menambah rangkaian permasalahan seperti menguat dan meluasnya rumor, spekulasi, gosip, dan hoax. Ada yang terorganisir seperti pada kasus Saracen, Lambe Turah, Polisi China, TKA China, dan MCA sewaktu Pemilu 2019 dan selepasnya maupun yang dilakukan secara individual. Cahyo Pamungkas, dalam intoleransi dan radikalisme dalam pertanyaan (2020), mengungkapkan medsos yang kini menjadi kebutuhan telah menjadi ekosistem bagi pasca-kebenaran (*post-truth society*), yakni kondisi dimana kebenaran tidak lagi bersifat tunggal karena ada penciptaan fakta-fakta sosial alternatif dari masing-masing kalangan yang mampu mempengaruhi opini publik sehingga yang kemudian terjadinya adalah kaburnya batas antara informasi yang benar dan salah. Identitas menjadi permainan yang paling laku di jagat maya melalui narasi keterancaman, ketersinggungan, dan ketidakpercayaan (wawancara pribadi dengan Azhar Ibrahim, 2023).

Post-truth sebenarnya timbul akibat distrupsi digital kalau menurut Wan Noraishah Wan Husin (wawancara pribadi, 2023). Menurut Lesya Uhryn ada Enam Dampak psikologis yang kemudian muncul akibat fenomena *post-truth* ditingkat individual yang dapat mengarah ke negatifitas diantaranya, (1). ODE (*online disinhibition effect*) yang membuat seseorang atau kelompok itu kemudian berani untuk berbuat apa saja tanpa hambatan sehingga kurang memahami akibat; (2). FOMO (Fear of Missing out) yang membuat seseorang atau kelompok merasa takut tertinggal sehingga ingin Viral, (3). Menormalisasi kebohongan, (4). Tidak punya acuan waktu, (5). Mempunyai mentalitas instan, dan (6). Lemah dalam intuisi yang rasional (Wawancara pribadi, 2023).

Karena dampaknya yang serius, kajian tentang politik identitas semakin meluas melampaui ruang akademis dan momentum politik. Sinisa Malesevic (2006) dalam kata pengantarnya untuk buku berjudul *Identity as Ideology Understanding Ethnicity and Nationalism*, mendeskripsikan kepopuleran kajian tentang ini karena:

As a result of this conceptual shift and the inherent logic of fashion today almost nobody would take lightly the accusation that he or she ideological', while nearly everybody would claim to have or be proud of having some kind of identity.

Dalam konteks perpolitikan di Indonesia yang sarat akan keberagaman etnik dan agama, memang agak sulit untuk melepaskan diri dari politik identitas. Menurut Rocky gerung Ada yang menggunakan naratif suku, ras, dan agama dan ada pula yang mengangkat identitas berdasarkan ideologi, isu yang diketengahkan, pandangan ekosospol, ketokohan, dan lain sebagainya (wawancara pribadi, 2023). Jadi jika ada aktor maupun kelompok politik yang berkata mereka tidak memakai bahkan anti terhadap

politik identitas tentu merupakan sebuah kemustahilan, karena karena partai politik saja menjadikan identitas sebagai kekuatan utama, sebagaimana deskripsi dari Gutmann (2014):

Many political parties are identity groups, calling upon and cultivating shared identities around ideology, class, religion, and ethnicity, among other mutual recognition.

Selanjutnya yang menjadi fokus dalam artikel ini adalah politik identitas yang negatif. karena secara ilmiah, tidak semua politik identitas itu negatif. Membaca kembali sejarah, proses kemerdekaan Indonesia saja bermula dari bangkitnya kesadaran akan identitas kebangsaan yang mana hal itu merupakan contoh dari politik identitas. Buya Hamka dalam Urat Tunggang Pancasila (1952) pernah mendeskripsikan:

Sebelum ada nasionalisme Indonesia, orang mencintai bangsanya dengan secara sempit. Bangsa Bugis, bangsa Jawa, bangsa Minang, bangsa Melayu raya, dan lain-lain. Tapi persamaan nasib dan penderitaanlah yang menyebabkan kita mencari segala macam bahan dan alasan buat menetapkan kebangsaan Indonesia yang sekarang ini (1952: 29).

Tetapi Menurut Lesya Uhryn (wawancara, 2023) meskipun politik identitas itu basisnya perbedaan, namun menekankan perbedaan tidak selalu berkonotasi negatif apalagi jika nalar publik dapat membedakan mana yang esensial dan mana yang tidak. Lesya (2023) mencontohkan dengan politik identitas berbasis patriotisme, misalnya yang kini populer di Ukraina yang ditekankan bukan pada permusuhan membabi-butakan terhadap mereka yang berbudaya Rusia di Ukraina apalagi keturunannya tetapi pada agresi yang dilakukan oleh Entitas Rusia sebagai pemerintah dan militernya.

Oleh karena itu, Bhikku Parekh (2020) juga menegaskan, politik identitas akan menjadi positif jika basisnya pada solidaritas, di jalankan melalui pemberdayaan, di sadarkan oleh moralitas, dan tujuannya untuk mencapai hasil yang positif namun akan menjadi negatif jika berbasis pada doktrin kebencian, pemikiran sempit, kepemimpinan otoriter, perasaan akan keterasingan, dan keinginan untuk mendominasi ruang multikultural yang kemudian mengancam prinsip hidup bersama secara aman dan harmonis (*al-ta'ayush al silmi*). Jadi kami memandang politik identitas itu seperti dua sisi mata pisau sebagaimana yang juga ditegaskan oleh Agius & Keep (2018) dalam "*The politics of identity: making and disrupting identity*" karena dapat dijadikan alat untuk pemersatu maupun pemecah belah.

Untuk mengkaji negatifitas dari politik identitas, riset ini berfokus pada fenomena utama yang merupakan indikasi dari politik identitas yang negatif, penyebab dari fenomena itu dapat terjadi, dan cara untuk mengatasi fenomena-fenomena yang negatif tadi. Secara spesifik, penelitian ini mempunyai empat tujuan: (1) memberikan kajian akademis untuk memahami antara politik identitas yang baik dan yang buruk; (2) menawarkan perspektif baru untuk mengatasinya; (3) mengisi kesenjangan

penelitian sebelumnya tentang politik identitas; (4) sebagai narasi-tanding terhadap narasi-narasi yang mengarahkan pada pembangkangan, ketidakpercayaan terhadap negara dan aparat yang mengatur pemilihan, pelintiran kebencian, dan neo-fasisme. Istilah mitigasi dalam konteks penelitian ini lebih menitikberatkan pada hal taktis, selain di satu sisi juga bermakna sebagai penguatan diskursus tentang politik identitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan studi pustaka, wawancara dengan akademisi, dan refleksi kritis sebagai pendekatannya. Studi pustaka berdasarkan bahan yang relevan dan terbaru yang membahas politik identitas secara konseptual, taktis, dan dampaknya bagi masyarakat yang multikultur. Wawancara kami lakukan dengan para pakar dari lingkup ilmu sosial dan politik yang juga mengkaji seputar politik identitas, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Daftar Narasumber

No.	Nama Pakar	Alasan Akademik	Institusi
1.	Azhar Ibrahim	Sebagai peneliti yang fokus pada isu agama dan masyarakat, khususnya melayu dan Indonesia.	National University of Singapore
2.	Syed Farid Alatas	Profesor sosiologi yang berfokus pada wilayah kajian sosiologi sejarah, sosiologi agama, dan dialog lintas-agama.	Universitas Indonesia
3.	Rocky Gerung	Dosen filsafat, pengamat politik	Universitas Indonesia
4.	Wan Noraishah Wan Husin	Ilmuwan humaniora perempuan yang fokus pada studi etnis.	Universitas Malaya
5.	Abdul Rahman Embong	Profesor sosiologi yang fokus pada kajian masyarakat menengah, globalisasi, dan pembangunan.	Universiti Kebangsaan Malaysia
6.	Lesya Uhryn	Dosen di program studi sejarah dan ilmu politik.	Universitas Ivan Franko Lviv

Sumber: Diolah tim penulis

Selain itu, refleksi kritis yang umumnya digunakan dalam konteks pendidikan untuk orang dewasa (andragogi) (Whitaker & Reimer, 2017) dapat bermanfaat untuk (1) memberikan kerangka dekonstruksi terhadap informasi yang kita terima agar lebih dapat memahami berbagai asumsi, hubungan, dan pengaruh yang tertanam di dalamnya serta bagaimana hal itu memengaruhi praktik dari objek utama yang diselidiki (Hickson, 2011; Lundgren & Poell, 2016; Matsuo, 2019; Taiwo, 2022); (2) menghindarkan

pengkaji dan pembaca terhindar dari jebakan bineritas (Janis Fook & Gardner, 2007); (3) memberi ruang berpikir yang mendalam (Jan Fook, 2011); dan (4) lebih berorientasi pada tindakan (Bassot, 2013).

Menurut Van Woerkom (2010) refleksi kritis memiliki karakter normatif yang berfokus pada "pemikiran yang baik" daripada sebatas menggambarkan yang diamati. Dalam konteks aktivisme intelektual, menurut Raja Ahmad Aminullah dalam bukunya "Pemikiran Tertawan: Intelektual, Rausyanfikir, dan Kuasa" (2020), refleksi kritis itu selaras dengan tugas intelektual yang memberi penilaian terhadap kondisi yang seharusnya. Menurut Jan Fook dan Fiona Gardner dalam buku *Practising Critical Reflection A Resource Handbook* (2007), kunci utama riset yang memakai refleksi kritis sebagai metode adalah adanya penggunaan reflektivitas, sebagaimana deskripsi dari Jon Fook:

In this sense, critical reflection becomes a way of researching the knowledge inherent in our practice, and connecting this knowledge (and ourselves) with our broader social contexts. With an understanding of reflexivity, we become more aware of ourselves as researchers, creating knowledge directly from practice experience. We focus particularly therefore on our assumptions about knowledge, its different forms, its role, what is important and how it is created (2007: 30).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Identitas

Secara sosiologis pemaknaan terhadap politik identitas tidak tunggal. Menurut Kiftiyah (2019), politik identitas adalah cara-cara politis yang mengutamakan kepentingan sebuah kelompok karena adanya persamaan identitas baik agama, ideologi, ras, etnis, maupun gender. Menurut Dhani (2019) dan Zahrotunnimah (2018), politik identitas adalah sarana politik untuk merebut kekuasaan yang berbasis pada hubungan antara identitas sosial dan politik. Sementara, menurut Weir (2008), politik identitas merupakan proses yang aktif sekaligus kompleks dalam konteks individu maupun kelompok dengan menggunakan politik melalui serangkaian proses identifikasi, penyatuan, pemaknaan, dan penciptaan narasi baru. Sementara menurut Bowen (2021) merupakan cara yang digunakan untuk memperluas klaim superioritas berbasis identitas. Dalam konteks politik dan demokrasi modern, politik identitas tidak terlepas dari pertautan antara kekuasaan, kepentingan, dan relasi antara mayoritas-minoritas (Machlis, 2022).

Identitas merupakan sebuah terminologi yang memiliki definisi satu untuk beberapa dan beberapa untuk satu (wawancara Syed Farid Alatas, 2022). Identitas dapat dipahami dalam arti yang luas (jika terkait dengan segala yang ada dalam diri manusia), dan dalam arti yang sempit (sesuatu yang khas dari individu atau kelompok), bahkan identitas dapat berarti tidak berarti apapun (sebab ambiguitas) (Brubaker & Cooper, 2000). Identitas juga

menurut Castells (2010) dapat menjadi sumber makna dan pengalaman bagi setiap orang, selaras dengan Yates (2015) yang menitikberatkan identitas itu menjadi makna karena terbentuk melalui interaksi yang berkelanjutan antara jiwa, budaya, dan masyarakat kemudian menjadi skema kognitif yang menyediakan kerangka untuk menginterpretasi pengalaman dan menentukan siapa dan akan menjadi apa kita di kemudian hari (Stryker & Burke, 2000).

Maka, menjadi hal wajar jika identitas akan menjadi formulasi yang selalu membentuk martabat, kebanggaan, atau kehormatan yang secara implisit menghubungkannya dengan kategori-kategori sosial (Fearon, 1999). Namun pertanyaan besarnya adalah, dengan segala identitas yang tertanam dalam diri individu atau kelompok, apakah hidup dengan hal tersebut termasuk dalam kehidupan berpolitik adalah sesuatu yang salah? Atau sebab dari pemahaman yang sempit tentang identitas yang cenderung menjadikan diksi politik identitas dipandang negatif?

Apalagi dampak dari politik identitas terbilang cukup efektif karena dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh Negara (Zilis, 2022), memobilisasi massa dalam jumlah yang cukup banyak (Trivedi & Singh, 2021; Vargas-Ramos, 2007), mendulang suara pasangan calon (Sircar, 2020; Suherman et al., 2020), menguatkan populisme (Rodrik, 2021), menjaga otoriatisme kekuasaan yang mengarah perlahan menuju totaliterisme (Hanson et al., 2021; L. J. R. Pauwels & Heylen, 2020; Stellmacher & Petzel, 2005), membuka ruang terhadap praktik fasisme dan kemunculan ekstrem kanan (Castelli Gattinara et al., 2013; Karapın et al., 1998; Wiessala, 1997), rasisme (Smith-Rosenberg, 2012), dan konservatisme agama (Smith-Rosenberg, 2012).

Politik identitas pada awalnya banyak dipelopori oleh kelompok kiri yang menilai penindasan terhadap golongan orang kulit hitam, perempuan, dan kelompok lesbian, homoseksual, biseksual, transgender, *queer*, interseks, aseksual, dan lainnya yang biasa dikenal dengan LGBTQIA++ perlu diakhiri (Boyer et al., 2022; Crenshaw, 2013; Dotson, 2018; M. Pauwels, 2020; Qasim, 2012; Walters, 2018; Wineinger & Nugent, 2020; Yousuf, 2021). Oleh karena itu, politik identitas dimaknai dan diartikan sebagai cara untuk membebaskan yang tertindas dari penindasan melalui penyadaran kembali terhadap identitas mereka (Ritchie, 2021). Dari sudut pandang marxisme, praktik dari politik identitas ditujukan untuk mendapatkan pengakuan, penghormatan, otonomi dengan berbasiskan pada atribut dan kepentingan bersama (Das, 2020).

Beberapa contoh kelompok kiri yang menggunakan politik identitas untuk melawan penindasan secara sistemik seperti: 1) The Combahee River Collective di Boston pada era 70-an yang populer di antara warga kulit hitam yang menyerukan perlawanan terhadap penindasan karena ras, kelas sosial, dan orientasi seksual (Çalışkan & Reissner, 2019; Cespedes et al., 2017;

Herrmann, 2018); 2) #MeToo Movement di amerika serikat (Hansen & Dolan, 2022) yang melawan kekerasan seksual; 3) gerakan *The Pro-Choice* yang mendukung hak atas aborsi (Muszynski & Staggenborg, 1995); 4) gerakan *El Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile* yang menyerukan hak demokrasi dan politik berserta kesejahteraan buruh perempuan (Miranda & Soto, 2021); 5) gerakan *La via Campesina* yang menyuarakan penindasan terhadap pekerja perempuan di sektor pertanian dan perkebunan sekaligus melawan hegemoni patriarki (Desmarais, 2008; Rosset et al., 2021; Val et al., 2019).

Tiga Tanda Politik Identitas yang Negatif

Ada banyak kajian yang mendapati politik identitas di Indonesia menuju arah yang negatif. Menurut Deasy Simandjuntak (2019), selama masa-masa pemilihan umum serentak di Indonesia ada banyak mobilisasi massa dan sentimen berbasiskan etno-religius. Ironisnya, menurut Romli (2019), ada keterlibatan aktor, gerakan politik, serta organisasi sipil di dalamnya. Pada Pilpres 2019 misalnya, kedua pasangan calon menggunakan simbol agama dalam hal ini Islam sebagai agama minoritas sebagaimana deskripsi dari penelitian yang dilakukan oleh Temby & Hu, (2019):

On the eve of the election on April 17 both sides have called on their supporters to wear white to the polling booth—as if the vote were an act of religious observance. The Jokowi Ma'ruf National Campaign team made its call in reaction to a call first made by the anti Ahok opposition 212 movement to wear white and guard the polling places until closing time.

Berdasarkan kajian kami, ada enam tanda politik identitas yang negatif yang kini dan nanti akan selalu terjadi. Ketiga tanda negatif ini jika diabaikan akan terus mencetuskan ketegangan SARA, hoaks, pelintiran kebencian, dan ketidakpercayaan terhadap negara dan penyelenggara Pemilu yang dapat menyebabkan polarisasi, kerusuhan, populisme, ketidaktahuan terhadap politik dan demokrasi sehingga dapat merusak modal sosial dan menurunkan kapasitas masyarakat dalam menghasilkan pencapaian terbaik (Herdiansah, 2017). Ketiga fenomena itu diantaranya:

1. Identitas senjata (Weaponized identity)

Weaponized identity atau identitas yang dipersenjatai menurut Hintjens (2001), Ezra (2020), dan Lacombe (2021) adalah teknik politik yang memanipulasi perasaan seseorang dan kelompok akan identitasnya melalui imajinasi budaya yang meyakinkan mereka tentang siapa yang paling pantas dan mengapa mereka harus dimusuhi. Fenomena identitas yang dipersenjatai melibatkan pengalaman, perspektif, dan kolektifitas yang merupakan kunci utama pengorganisasian identitas (Bowen, 2021).

Jika kita cermati, kondisi perpolitikan pasca reformasi yang memang mengalami kebebasan dan kemajuan dari sebelumnya ini namun di sini timbul masalah baru berupa paradoks-paradoks, termasuk fenomena negatif politik identitas akibat dari hadirnya kelompok-kelompok yang mempolitisasi identitas dalam masyarakat (Frenky, 2021).

Pembacaan kami terhadap beberapa buku tentang propaganda Nazi terkait fenomena ini mendapati Penggunaan retorika dan propaganda yang memanfaatkan prasangka menjadi hal wajib yang terus menerus dilakukan untuk menguatkan imajinasi antagonisme, superioritas, dan keterancaman (Fritzsche, 2022; Hoffmann & Evans, 2005; Hutton, 2017; Jones, 2002; Lemmons, 2013). Muara fenomena ini adalah pemutusan interaksi dengan pihak yang dianggap musuh, penciptaan pertentangan, glorifikasi superioritas, keyakinan akan adanya ancaman, curiga terhadap wacana-wacana intelektual, memiliki tafsir sendiri terhadap kebhinekaan, dan melegalkan tindakan persekusi dan intoleransi, dan mobilisasi protes terus-menerus untuk isu-isu yang dianggap mengancam dan menyerang identitas.

Menurut Bruce White dan Emilia Group (2020), fenomena ini memberikan informasi tentang budaya yang dimanipulasi untuk memicu ketidakamanan, ketakutan akan kehilangan makna, ancaman terhadap konsep diri, dan rasa ketidakadilan. Dalam hal ini, ada tiga teknik *weaponization of identity*, di antaranya:

- a. Mengkonstruksi perbedaan yang menjelekkan dan menakut-nakuti, sembari memanfaatkan permusuhan yang sudah ada sebelumnya antara kelompok untuk lebih memanipulasi perpecahan.
- b. Adanya gagasan eksklusif tentang identitas diri dalam kelompok yang membenarkan permusuhan dalam hal absolut secara moral.
- c. Adanya pembatasan yang konsisten terhadap diskursus tentang tentang budaya, simbol, dan narasi. Hal ini diperlukan untuk memperkuat konstruksi permusuhan yang telah tercipta.

Contoh nyata dari fenomena ini dalam masa-masa kampanye adalah penggunaan istilah pribumi, ulama, dan umat yang digunakan selama pilkada Jakarta 2017 dan Pemilu serentak 2019 yang terbukti sukses menciptakan kekerasan sosial meskipun dalam skala mikro dan meso berupa persekusi dan intoleransi, mobilisasi massa untuk tujuan protes, dan anggapan jika ketiga istilah tadi benar-benar sedang terancam. Dalam lintasan sejarah, ada banyak aktor dan gerakan politik yang menggunakan fenomena ini seperti Hitler dengan partai Nazi-nya dengan supremasi ras Arya Jerman, Theodore Herzl dengan Zionisme Yahudi, dan ISIS yang mempersenjatai identitas umat Islam.

2. *Siberbalkanisasi (Cyberbalkanization/ splitinternet)*

Menurut Bennett (2012) dan Bonacchi et al (2018) pertautan antara politik identitas dengan dunia digital terutama media sosial berpotensi menyebabkan konsekuensi yang serius bagi negara. Terlebih, saat ini media

digital memainkan peran fundamental dalam pembentukan identitas nasional (Khan, 2012). Salah satu fenomena yang seringkali luput dari pembahasan adalah siberbalkanisasi (*Cyberbalkanization* atau *splitinternet*) yang diartikan sebagai segregasi dan fragmentasi yang diciptakan melalui internet sehingga penggunaannya terkelompok berdasarkan faktor-faktor yang sama (*like-minded people*) seperti ideologi, afiliasi politik, pemahaman agama, dan lain sebagainya yang cenderung homogen (Chung hong Chan et al., 2019).

Ciri utama dari siberbalkanisasi adalah adanya isolasi secara sukarela dari para pengguna, karena pada dasarnya mereka yang memiliki kesamaan yang cenderung tidak menyukai keberagaman dalam interaksi (van Alstyne dan Brynjolfsson, 1996) sehingga mereka membentuk komunitas mikro yang sesuai dengan pandangannya dan dari sana mereka mengembangkan identitas menjadi fandom yang fanatik (Fenton et al., 2021). Perihal isolasi sosial ini, Scott Malcomson dalam bukunya "*Splinternet: How Geopolitics and Commerce are Fragmenting the World Wide Web*" yang dibahas oleh Grinberg (2018) menyatakan bahwa ada proses yang kuat antara pencarian dan komunitas:

Search and community are closely related. A search engine finds commonalities among things based on their attributes, then ranks the results according to indices of popularity, power or quality.

Pada awalnya fenomena ini terjadi karena adanya penyensoran dari negara terhadap konten-konten tertentu yang membuat para pengguna internet gagal mengakses keberagaman informasi (Anderson, 2012; Lemley, 2020). Namun, lambat laun fenomena ini juga terjadi dalam kondisi keterbukaan. Kajian dari Temby & Hu (2019) mendapati para pengguna internet dalam konteks Indonesia mengelompokkan diri mereka ke dalam gelembung-gelembung misalnya grup fandom paslon maupun pasukan siber di medsos. Kumpul sekolam, kelompok Kadrun, Saracen, dan Lambe Turah adalah contohnya dari terjadinya fenomena ini dalam konteks Pemilu.

Lebih jauh, ada empat dampak nyata dari fenomena ini yaitu (1) munculnya tendensi yang membenarkan dan merindukan otoritarianisme (Muller, 2017); (2) dapat mengakibatkan terjadinya polarisasi terutama pada kalangan anak muda sebagai pengguna internet terbesar (Chung-hong Chan dan Fu, 2015); (3) memungkinkan ekosistem untuk radikalisme berkembang, baik secara individual atau yang diistilahkan dengan *lone wolf* maupun kolektif dikarenakan proses internalisasi kebencian menjadi lebih efektif karena eksposur informasi yang homogen secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebenaran; (4) menormalisasi penolakan terhadap keberagaman informasi (Janc, 2016; Thornton & Henderson, 1997); (5) memperbesar kemungkinan terjadinya ketakutan sosial-politik yang manipulatif.

3. *Kebangkitan Konservatisme dan Populisme Agama*

Ketegangan politik dalam Pilkada Jakarta 2017 dan Pemilu 2019 oleh beberapa peneliti sering dikaitkan pada fenomena kebangkitan konservatisme dan populisme khususnya Islam (Aji & Yunus, 2019; Jayanto, 2019). adanya fenomena kebangkitan Islam [*as Shahwa al Islamiyya*] di ranah politik merupakan indikasi menguatnya semangat Islam fundamental [*al Ghirah al Islamiyya*] (Huda, 2021; Muharam et al., 2021; Nurjaman et al., 2018; van Bruinessen, 2002).

Apalagi pasca aksi bela Islam yang membangkitkan mobilisasi politik Islam secara sistemik. Pada Pemilu 2019, kedua paslon pada dasarnya mendasarkan pertarungan politiknya pada upaya untuk merebut suara umat Islam yang menjadi mayoritas karena itu pada kedua paslon selalu menonjolkan aspek religiutas melalui strategi politik yang tepat (Sihidi et al., 2020) seperti safari ke pondok-pondok pesantren, menggandeng pendakwah yang berpengaruh untuk kampanye, membuat *itjima* ulama, dan lain sebagainya.

Kebangkitan politik identitas berbasis keIslaman tidak terjadi secara spontan ataupun sebatas pemahaman yang salah atas agama, tetapi juga dikarenakan ada semangat kecintaan terhadap agamanya dan perasaan termarginalisasi (Basya, 2019) yang disertai skeptisisme politik (Basya, 2021). Sehingga narasi untuk kembali pada sistem ataupun calon yang dianggap paling Islam menjadi keutamaan, seringkali agama Islam dihadapkan dengan demokrasi, padahal sebaliknya.

Apalagi fenomena ini terpaut dengan digitalisasi sehingga akselerasinya berlangsung lebih cepat. Misalnya, pada kasus yang mengaitkan paslon, partai, dan pendukung lawan dengan tragedi masa lalu seperti PKI maupun DI/TII maupun narasi yang berupaya merevisi sejarah dengan mengecilkan pihak lain dan menempatkan umat Islam sebagai pemilik kredit yang terbesar atas NKRI sehingga berhak mendapatkan porsi lebih tetapi disatu sisi mereka pun menginginkan hanya kelompok mereka saja buka sesame islam lainnya yang mereka pandan kurang islam karena soal politik. Padahal, bukan berarti dahulu tidak ada yang berjuang membawa identitas Islam untuk tegaknya Indonesia, tapi tidak semestinya hal itu digunakan untuk menekankan pada persoalan siapa yang mesti dapat kredit paling besar karena NKRI pada dasarnya diperjuangkan bersama-sama melampaui sekat mayoritas-minoritas.

Dampak dari hal ini tidak bisa dipandang remeh, menurut Prayogi (2019) yang mengambil contoh dari Pilkada Jakarta, misalnya dapat mempengaruhi preferensi pilihan dalam kontestasi pesta demokrasi. Arifin (2019) juga turut merespon hal ini jika terus dirawat akan menjadi strategi yang permanen dalam kontestasi politik elektoral di tingkat nasional maupun lokal. Dalam konteks aksi bela Islam misalnya, hal itu telah membuktikan dapat dijadikan metode otoritatif yang efektif untuk

membentuk wacana sekaligus politik (Ahyar & Alfitri, 2019). Apalagi dalam konteks Indonesia, agama sering dipahami dalam tipologi keberagaman yang biner, misalnya antara santri versus abangan, Muslim puritan versus Muslim sinkretis, religious nasionalis vs religious intoleran, dan liberal versus kaffah.

Lebih jauh, seringkali narasi politik identitas keislaman ini dibenturkan dengan sikap anti terhadap kelompok China dan minoritas yang berbeda sementara mereka yang melawannya pun mengasosikan politik identitas keislaman ini terpaut dengan etnis arab. Di sini sudah terjadi pembentukan konservatisme agama yang intoleran, counter-narasi yang kebablasan, dan rasisme yang sangat berbahaya. Nicholas Goodrick-Clarke dalam bukunya berjudul "*Black Sun: Aryan Cults, Esoteric Nazism, and Aryan Cults, Esoteric Nazism and the Politics of Identity*" (Whaley, 2004), mendeskripsikan:

The risks of racist religiosity are great. By projecting grievances, fears and anxieties onto the "shadow" figures of other races, religious transcendency is stunted and perverted into the dynamics of exclusion and hatred. Instead of genuine spirituality, there is partiality, separation, restriction. A rigid selfrighteousness leads down into the spiritual basement of a primitive dualism, where pseudo-salvation depends on the elimination of the Other. The political projection of religious Manichaeism onto human differences inevitably leads to strife and violence.

Empat Penyebab Politik Identitas menjadi Negatif

Kami mendapati ada empat penyebab praktik politik identitas membawa ke arah yang negatif. Di antaranya:

1. Normalisasi Budaya Partisan

Budaya partisan yang berlogika "kita" versus "mereka" yang berkonotasi negatif selalu dinormalisasi atas nama kemelakatan pada kelompok. Budaya partisan menurut kamus Merriam-Webster diartikan sebagai sebagai keberpihakan yang kuat bahkan cenderung buta. Dalam konteks politik sehari-hari, memilih untuk tidak partisan akan dipandang aneh, karena netralitas dan bersikap biasa saja terhadap pilihan merupakan suatu sikap yang masih belum dapat diterima sepenuhnya bahkan diasosiasikan dengan sikap apatis dan buta politik. padahal mereka yang bersikap netral tidak selalu apatis apalagi buta politik, tidak sedikit yang memilih untuk tidak ingin terjebak pada polarisasi yang menyesatkan karena sesungguhnya politik itu luwes, bahkan ada istilah "yang dilawan hari ini, bisa menjadi kawan di hari esok dan nanti".

Terjebak pada budaya partisan dalam konteks politik pada akhirnya membuat kita tidak ada kedirian, bahkan membenarkan cara-cara yang tidak benar untuk menjatuhkan bahkan membenci pihak lawan secara terus-menerus. Tucker Carlson dalam bukunya berjudul "*Politician,*

Partisans, dan Parasites” (2003) mendeskripsikan seorang yang terjebak pada budaya partisan dengan:

scene in Animal Farm where the pigs repaint the slogans on the side of the barn and expect all the other animals to pretend they've never changed. When you're a partisan, you're the other animals. The party tells you what to do, and you do it. You take directions. You obey. It's like being in the Army, without the nobility. You're an orderly, the weakest guy in prison, somebody else's errand boy. You're not a man (Tucker Carlson, 2003).

2. *Adanya Aktor Politik Termasuk Pemuka Agama yang Melegitimasi dan Menyebarkan Politik Identitas yang Negatif*

Pada kasus Pemilu 2014, ulama sulit melepas perannya dari politik identitas, terlepas dari keterlibatan mereka dalam partai politik atau tidak. Di lain sisi, keterlibatan ulama dalam Pemilu berkontribusi menjaga netralitas. Namun sayangnya, beberapa ulama justru melarang umatnya untuk memilih kandidat tertentu (Winarni, 2014). Berdasarkan politik identitas dan evaluasi atas sikap para ulama di media sosial, mereka berafiliasi dalam pemilihan presiden dengan menggunakan agama sebagai tujuan politik. Bagaimanapun, Pemilu 2014 memungkinkan mereka untuk memikirkan ulang sikap politik mereka karena banyak isu negatif yang muncul selama kampanye dibandingkan Pemilu tahun 2004 dan 2009. Politik identitas para ulama tampak selalu dalam agenda perubahan dan dapat berkontribusi dalam pemilihan presiden. Lebih lanjut, tradisi safari politik selama sebelum pemilihan berlangsung membentuk keunikan karakter di setiap pemilihan presiden di Indonesia. Peran ulama muncul melalui fatwa, meskipun jika kandidat yang mereka larang untuk dipilih pada akhirnya menang maka fatwa tersebut tidak lagi berlaku (Winarni, 2014).

3. *Marjinalisasi*

Selama ini, marjinalisasi selalu dikonstruksi di dalam ruang perasaan. Padahal, kenyataan sosial-lah yang mendorong seseorang merasakan dirinya termarginalkan. Fakta sosial masih menyatakan Indonesia sedang bergelut dengan masalah kesejahteraan yang oleh Almarhum Buya Syafie Maarif dikarenakan kita sebagai bangsa yang besar menelantarkan sila kelima tentang keadilan sosial bagi rakyat Indonesia (2016).

Realitas sosial pada akhirnya memberikan pembenaran dan kebenaran terhadap marjinalisasi, baik dalam ruang identitas teologis, ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan, aktor politik pun menggunakan narasi kampanye yang mengandung marjinalitas tadi sebagai branding utama seperti adanya narasi pro-rakyat kecil, pribumi tertindas, dan Islam terancam. Jika perasaan dan kenyataan ini terus menerus dipelihara maka bukan tidak mungkin dipelintir ke arah yang negatif dan dapat menyediakan ekosistem yang subur untuk tumbuhnya politik populis yaitu suatu kondisi politik yang hanya memberi perhatian terhadap secuil agenda politik yang dapat

mendulang dan mempertahankan kekuasaan tanpa mempunyai arah dan inisiatif terbaik untuk rakyat (Gidron & Hall, 2020) bahkan mendorong terjadinya provokasi kearah revolusi sosial, karena logika terjadinya revolusi sosial jika menurut para intelektual kiri ketika roti, ekonomi, dan hati terpinggirkan.

4. *Munculnya Pandangan Ekstremis dari Ruang Publik*

Kebebasan dan keterbukaan yang kita rayakan di ruang publik nyatanya membuka ruang penyebaran pemahaman ekstremisme menjadi lebih cepat dan terang-terangan. Cherin George mengistilahkan ini sebagai pelintiran kebencian, yang memanfaatkan ekosistem keterbukaan untuk menyebarkan pemahaman antagonisme (George, 2017). Memainkan nama Tuhan sembari memanfaatkan Google (internet) dan pengaruh globalisasi menjadi keutamaan (Miller-Idriss, 2017).

Apalagi di era saat ini dan nanti, seseorang yang memiliki pandangan ekstrem tidak perlu menjadi aktor politik setara Adolf Hilter, misalnya untuk menyebarkan kebencian pada pihak lain. Cukuplah memiliki pengikut yang banyak di media sosialnya. Dari situlah dia akan menyebarkan pandangan ekstrem tersebut secara cepat. Munculnya *influencer* atau orang yang berpengaruh atau mampu mempengaruhi karena memiliki pengikut di media sosial pribadinya yang cukup besar, yang tentu saja, di luar spektrum gerakan politik seringkali digaet oleh gerakan politik elektoral untuk menguatkan basis dukungannya karena pengikut dari *influencer* tadi tetaplah menjanjikan untuk mempengaruhi opini publik. Dan publik pun cenderung menerima pandangan ekstrem tadi sebagai alternatif yang mencerahkan padahal belum tentu.

5. *Isu Kepercayaan*

Meskipun ada survey yang menyatakan kepuasan terhadap pemerintah meningkat, bukan berarti soal kepercayaan harus diterima begitu saja sehingga seolah-olah sangat kuat. Terbukti dengan adanya ketidakpercayaan terhadap hasil Pemilu 2019 dan bahkan bertahan hingga saat ini. Hampir setiap isu yang coba diselesaikan oleh pemerintah maupun penyelenggara Pemilu dianggap hanyalah rekayasa dan sebatas pencitraan. Dalam konteks politik identitas, isu kepercayaan dapat dimanfaatkan untuk mendorong terjadinya pembangkangan sipil dalam skala mikro maupun makro.

6. *Minimnya Literasi Politik*

Literasi politik bukan saja soal seberapa banyak membaca buku-buku dan seberapa banyak soal politik di hadirkan tetapi lebih daripada itu adalah proses berkelanjutan diruang pendidikan untuk mengerti dan memahami iklim demokrasi dan politik yang luwes, damai, dan sadar akan kebhinekaan. Ironisnya, sosialisasi terhadap literasi politik masih kurang, jikapun ada masihlah terpaut pada dunia akademis dan pelaksanaannya sebatas formalitas semata.

Memitigasi Dampak Negatif Politik Identitas

Ada delapan cara untuk memitigasi dampak negatif politik identitas yang mencakup tiga aspek yaitu pencegahan, penindakan, dan penyelesaian. Aspek pencegahan lebih kepada pendidikan, penindakan lebih kepada hukum, dan penyelesaian lebih kepada upaya-upaya sosiologis.

1. Aspek Pencegahan

a. Menekankan kampanye berbasis ide

Penyelenggara Pemilu, pemerintah, maupun aktor politik perlu bersepakat untuk berkampanye berbasis gagasan dan hal-hal yang esensial alih-alih membakar perbedaan. Boleh jadi, hal ini sulit dilakukan di tengah pragmatisme politik. Namun hal ini perlu dicoba menjadi eksperimen sosio-politis dengan memberikan pemahaman pada masyarakat jika masalah kepemimpinan politik bangsa ini yang cenderung kacau dikarenakan kampanye yang jauh dari hal-hal yang esensial. Tentu saja politik uang dan sentiment harus ditepikan karena yang pertama akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan sementara yang Kedua akan membuka peluang terjadinya benturan.

b. Nol toleransi terhadap intoleransi

Fenomena normalisasi terhadap intoleransi yang terjadi selama Pemilu 2019 (Toha, 2017; Toha et al., 2021) perlu diatasi dengan sikap yang intoleran terhadap intoleransi itu sendiri. Kendati intoleransi dipandang sebagai ancaman terhadap pluralitas, ia bisa menjadi sebuah kata yg penting digamit, yakni: kita mesti bersikap intoleran terhadap segala bentuk intoleransi itu sendiri. Jadi, intoleransi dapat masuk akal manakala dimaksudkan untuk mencegah segala bentuk tindakan dehumanistik yang merusak kebhinekaan atas nama apa pun juga.

c. Memperkuat literasi dan praktik politik berbasis etika dan moral serta kritisisme

Menurut Hasibuan dkk. (2018) kuatnya budaya korupsi menghasilkan tindakan elit politik yang mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya sehingga mereka terlepas dari kesadaran terhadap kepentingan umum apalagi soal etika dan tanggung jawab moral. Di tingkat elit, mulai dari aktor dan partai politik perlu menekankan praktik politik berbasis etika dan moral. Hal ini diperlukan agar praktik politik tidak disalahpahami sebatas upaya untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu paradigma politik perlu diubah dari “disharmoni” menjadi harmoni. Kritisisme perlu untuk dikembangkan untuk mendiagnosa, mencegah, dan menyelesaikan permasalahan. Di ranah praktis,

perlu adanya dorongan terus menerus melakukan Pengawasan partisipatif terutama diruang privat yang tidak tersentuh oleh oleh pengawas Pemilu.

- d. Pemuka agama dan gerakan keagamaan perlu aktif dalam berdakwah secara kultural dan kontekstual

Politisasi identitas keagamaan yang negatif tentu tidak hanya terjadi pada agama Islam namun juga agama lain yang diakui di Indonesia. Dikarenakan Islam menjadi agama mayoritas, seringkali jauh lebih sering dimanfaatkan. Di poin ini, kami mengutip deskripsi dari Azhar Ibrahim dalam bukunya “Memikirkan ulang tradisi untuk pembaharuan” (2019) sebagai solusi, yang menyatakan:

Kefahaman Islam yang luas, dengan sisi intelektualisme yang ampuh, bervisi kemanusiaan, serta keprihatinan kepada latar dan nuansa kebudayaan adalah hal yang perlu terus-menerus ditampilkan. Dengan masyarakat yang semakin deras berubah, serta demografi umat yang relatif muda, berpendidikan, dan urban, maka cara berdakwah tidak boleh lagi menggunakan pola lama. Sikap serba tahu, serba betul, dan benar dengan penyampaian yang keras hanya akan merusakkan citra Islam sebagai agama damai.

- e. Mendukung wacana-wacana yang melawan politik identitas dari lapisan masyarakat termasuk mahasiswa dan membina generasi muda berbasis nasionalisme yang positif. Gerakan mahasiswa perlu diberikan ruang yang cukup untuk terlibat dalam upaya-upaya meretas politik identitas yang arahnya negatif. Ruang-ruang diskursus yang mereka ciptakan sebelum dan sesudah Pemilu perlu didukung dan kajian mereka perlu untuk dipertimbangkan. Protes dan kritik yang mereka lakukan jangan terus menerus dinilai secara negative karena seringkali apa yang mereka lakukan merupakan upaya sadar akan tanggung jawab mereka sebagai intelektual organik.

Dukungan dalam konteks ini tidak melulu hanya dalam konteks finansial tapi fasilitas dan upaya-upaya untuk merespon apa yang mereka temukan di lapangan. Pembinaan dan pengembangan generasi muda Indonesia sebagai *revitalizing agent* perlu dibina atas empat landasan kukuh: 1) landasan ideologis-Pancasila; 2) landasan konstitusional-Undang-Undang Dasar (UUD) 1945; 3) landasan strategis-garis-garis besar haluan negara; 4) landasan historis-Sumpah Pemuda 1928 & Proklamasi Kemerdekaan 1945. Memberdayakan generasi muda sangat penting apalagi di tengah momentuk bonus demografi. Mereka bisa menjadi garda terdepan dalam memutus paham-paham yang salah seperti politik identitas yang negatif.

2. *Aspek Penindakan*

- a. Penegakan hukum yang tegas, terbuka, responsif, dan tidak pandang bulu

Kelemahan penegakan hukum terutama dalam hal-hal yang menyentuh isu-isu yang sensitif masih dinilai berat sebelah bahkan ada kecurigaan mereka yang berada pada posisi yang berkuasa akan aman dari penindakan. Sehingga menjadi wajar jika kemudian publik sampai menganggap ada perlindungan terhadap kelompok *buzzer* oleh pemerintah dikarenakan beberapa-beberapa oknum yang mendukung pemerintah yang juga sempat menyentuh sensitifitas terutama agama dan suku tidak diberi tindakan/sanksi tegas. Penegakan hukum yang memenuhi kaidah tegas, terbuka, responsif, dan tidak pandang bulu dapat meningkatkan kepercayaan publik.

- b. *Cross-cutting royalty* sebagai hukuman sosial

Publik dan aktor politik perlu dididik untuk berani menarik kesetiaan sekiranya aktor dan gerakan politik yang diikutinya atau tengah mendekatinya ternyata berpotensi merusak kebhinekaan. *Cross-cutting royalty* ini adalah hukuman sosial yang mana dapat mencegah mereka yang memainkan politik kebencian untuk berada pada tampuk kekuasaan.

3. *Aspek Penyelesaian*

- a. Rekonsialisasi sosial-politis

Menurut Hasibuan et al (2018), selepas Pemilu pihak-pihak yang bertanding dan para pendukungnya dengan difasilitasi dan dikawal oleh penyelenggara Pemilu dan gerakan sipil perlu untuk melakukan rekonsiliasi agar ketegangan tersebut usai selepas penentuan calon yang menang. Dialog menjadi kunci utama untuk menceraabut kebencian-kebencian yang terlanjur tertanam. Memberi contoh yang baik, menurut (Ardipandanto, 2020) Pemerintah dan Lembaga Perwakilan Rakyat (DPR RI dan DPD RI) perlu mengajak semua tokoh masyarakat, baik tokoh politik atau tokoh agama, agar mereka semua harus bersama-sama memberikan contoh yang baik.

KESIMPULAN

Di tengah kehidupan berbangsa yang masih bergelut pada berbagai isu seperti kesejahteraan, hak asasi manusia, keagamaan, hukum, dan lain sebagainya perihal politik identitas akan menjadi bola liar, meskipun tidak selalu negatif tetapi akan tergantung dengan aktor politik yang bermain dan para pemilih yang dimainkan apalagi di era digital dengan berbagai permasalahannya. Penelitian kami menemukan ada delapan cara dalam mengatasi dampak negatif politik identitas, tetapi kedelapan cara ini perlu dimulai dari upaya peningkatan kualitas melalui tindakan yang terarah dan

konsisten terhadap demokrasi, pendidikan politik dan demokrasi, kepemimpinan, hukum, dan keamanan dari segenap lapisan bangsa sebelum dan sesudah Pemilu untuk menghindari disintegrasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agius, C., & Keep, D. (2018). The politics of identity: Making and disrupting identity. In *The politics of identity: Place, space and discourse*. <https://doi.org/10.7228/manchester/9781526110244.003.0001>.
- Ahyar, M., & Alfitri. (2019). Aksi bela islam: Islamic clicktivism and the new authority of religious propaganda in the millennial age Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1). <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1>.
- Aji, A. M., & Yunus, N. R. (2019). Identity Politics in Cultural and Structural Islam in Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 19(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.10860>.
- Aminullah, R. A. (2020). Tugas Rausyanfikir . In *Minda Tertawan: Intelektual, Rausyanfikir dan Kuasa* (pp. 17–18). SIRD.
- Anderson, D. (2012). Splinternet Behind the Great Firewall of China. *Queue*, 10(11). <https://doi.org/10.1145/2390756.2405036>.
- Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism Perspective]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1). <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582>.
- Arifin, S. (2019). Islam, Populisme dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. *MAARIF*, 14(1). <https://doi.org/10.47651/mrf.v14i1.46>.
- Bassot, B. (2013). The reflective journal by Bassot, Barbara, author. In *Driscoll's "What? "Model*.
- Bassot, Barbara. (2013). The reflective journal / Barbara Bassot. In *The reflective journal*.
- Basya, M. Hilali. (2019). Populisme Islam, Krisis Modal Sosial dan Tantangan Terhadap Demokrasi: Refleksi Pemilu 2019. *MAARIF*, 14(1). <https://doi.org/10.47651/mrf.v14i1.48>
- Basya, Muhammad Hilali. (2021). Political Distrust and Islamic Populism: Study on Tarbiyah Community in Pemilu 2019. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 7(1). https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v7i1.4987
- Bennett, W. L. (2012). The Personalization of Politics: Political Identity, Social Media, and Changing Patterns of Participation. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 644(1). <https://doi.org/10.1177/0002716212451428>.
- Bonacchi, C., Altaweel, M., & Krzyzanska, M. (2018). The heritage of Brexit: Roles of the past in the construction of political identities through social media. *Journal of Social Archaeology*, 18(2). <https://doi.org/10.1177/1469605318759713>
- Bowen, Z. (2021). Transversal Communication and Boundaries of Identification. In *Cross-Fertilizing Roots and Routes*.

- https://doi.org/10.1007/978-981-15-7118-3_7.
- Boyer, M. M., Aaldering, L., & Lecheler, S. (2022). Motivated Reasoning in Identity Politics: Group Status as a Moderator of Political Motivations. *Political Studies*, 70(2). <https://doi.org/10.1177/0032321720964667>.
- Çalışkan, G., & Reissner, K. (2019). How we get free: black feminism and the Combahee river collective. *Ethnic and Racial Studies*, 42(8). <https://doi.org/10.1080/01419870.2018.1540792>.
- Castelli Gattinara, P., Froio, C., & Albanese, M. (2013). The appeal of neo-fascism in times of crisis. the experience of CasaPound Italia. *Fascism*, 2(2). <https://doi.org/10.1163/22116257-00202007>.
- Castells, M. (2010). Communal Heavens: Identity and Meaning in the Network Society. In *The Power of Identity*. <https://doi.org/10.1002/9781444318234.ch1>.
- Cespedes, K. L., Evans, C. R., & Monteiro, S. (2017). The Combahee River Collective forty years later: Social healing within a black feminist classroom. *Souls*, 19(3). <https://doi.org/10.1080/10999949.2017.1390361>.
- Chan, Chung-hong, & Fu, K.-W. (2015). *Predicting Political Polarization from Cyberbalkanization*. <https://doi.org/10.1145/2786451.2786509>.
- Chan, Chung hong, Chow, C. S. lun, & Fu, K. wa. (2019). Echoslamming: how incivility interacts with cyberbalkanization on the social media in Hong Kong. *Asian Journal of Communication*, 29(4). <https://doi.org/10.1080/01292986.2019.1624792>.
- Crenshaw, K. W. (2013). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. In *The Public Nature of Private Violence: Women and the Discovery of Abuse*. <https://doi.org/10.2307/1229039>.
- Das, R. (2020). Identity Politics: A Marxist View. *Class, Race, Corporate Power*, 8(1). <https://doi.org/10.25148/crcp.8.1.008921>.
- De Toffoli, M. (2022). Segnico, simbolico, politico. *Materiali Di Estetica. Terza Serie*, 8.2. <https://doi.org/10.54103/mde.i8.2.16979>.
- Desmarais, A. A. (2008). The power of peasants: Reflections on the meanings of La Via Campesina. *Journal of Rural Studies*, 24(2). <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2007.12.002>.
- Dhani, F. W. (2019). KOMUNIKASI POLITIK BERBASIS POLITIK IDENTITAS DALAM KAMPANYE PILKADA. *Metacommunication: Journal of Communication Studies*, 4(1). <https://doi.org/10.20527/mc.v4i1.6360>.
- Dotson, K. (2018). On the way to decolonization in a settler colony: Re-introducing Black feminist identity politics. *AlterNative*, 14(3). <https://doi.org/10.1177/1177180118783301>.
- Ezra, M. (2020). Weaponized Whiteness: The Constructions and Deconstructions of White Identity Politics by Fran Shor. *American Studies*, 59(4). <https://doi.org/10.1353/ams.2020.0037>.
- Fearon, J. D. (1999). What Is Identity (As We Now Use the Word)? *Department of Political Science (Stanford University)*.
- Fenton, A., Gillooly, L., & Vasilica, C. M. (2021). Female fans and social media: micro-communities and the formation of social capital. *European Sport Management Quarterly*. <https://doi.org/10.1080/16184742.2020.1868546>.

- Fook, Jan. (2011). Developing Critical Reflection as a Research Method. In *Creative Spaces for Qualitative Researching*.
https://doi.org/10.1007/978-94-6091-761-5_6.
- Fook, Janis, & Gardner, F. (2007). *Practising critical reflection: a resource handbook*.
- Fritzsche, S. (2022). Fascist drag. *Science Fiction Film & Television*, 15(1).
<https://doi.org/10.3828/sfftv.2022.3>.
- George, C. (2017). Hate Spin: The Twin Political Strategies of Religious Incitement and Offense-Taking. *Communication Theory*, 27(2).
<https://doi.org/10.1111/comt.12111>.
- Gidron, N., & Hall, P. A. (2020). Populism as a Problem of Social Integration. *Comparative Political Studies*, 53(7).
<https://doi.org/10.1177/0010414019879947>.
- Grinberg, D. (2018). Scott Malcomson: Splinternet: How Geopolitics and Commerce are Fragmenting the World Wide Web. *New Global Studies*, 12(2). <https://doi.org/10.1515/ngs-2018-0003>.
- Gutmann, A. (2014). Introduction. The Good, the Bad, and the Ugly of Identity Politics. In *Identity in Democracy*.
<https://doi.org/10.1515/9781400825523.1>.
- Hansen, M. A., & Dolan, K. (2022). Cross-Pressures on Political Attitudes: Gender, Party, and the #MeToo Movement in the United States. *Political Behavior*. <https://doi.org/10.1007/s11109-021-09763-1>.
- Hamka,. (1951). *urat tunggang pancasila*. Pustaka Keluarga Jakarta.
- Hanson, K., O'Dwyer, E., & Lyons, E. (2021). The national divide: A social representations approach to US political identity. *European Journal of Social Psychology*, 51(4–5). <https://doi.org/10.1002/ejsp.2791>.
- Hasibuan, P. A. S., Indrawati, M., & Hartati, C. S. (2018). Punahnya Etika Moral Elit Politik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik*, 01(04).
- Herdiansah, A. G. (2017). Politisasi Identitas dalam Kompetisi Pemilu di Indonesia Pasca 2014. *Jurnal Bawaslu*, 3(2).
- Herrmann, A. C. (2018). The Combahee River Collective Statement. In *Theorizing Feminism*. <https://doi.org/10.4324/9780429494277-3>.
- Hickson, H. (2011). Critical reflection: Reflecting on learning to be reflective. *Reflective Practice*, 12(6).
<https://doi.org/10.1080/14623943.2011.61668>
- Hintjens, H. M. (2001). When identity becomes a knife: Reflecting on the genocide in Rwanda. *Ethnicities*, 1(1).
<https://doi.org/10.1177/146879680100100109>.
- Hoffmann, S., & Evans, R. J. (2005). The Third Reich in Power, 1933-1939. *Foreign Affairs*, 84(6). <https://doi.org/10.2307/20031804>.
- Huda, M. N. (2021). Post-Islamism: The New Face of Political Islam in Indonesia. *Journal Intellectual Sufism Research (JISR)*, 3(2).
<https://doi.org/10.52032/jisr.v3i2.94>.
- Hutton, C. (2017). Racial ideology as elite discourse: Nordicism and the visual in an age of mass culture. *Social Semiotics*, 27(3).
<https://doi.org/10.1080/10350330.2017.1301798>.
- Ibrahim, azhar. (2019). *Memikir-Ulang Tradisi Untuk Pembaharuan*. SIRD.
- Janc, K. (2016). A Global Approach to the Spatial Diversity and Dynamics of

- Internet Domains. *Geographical Review*, 106(4).
<https://doi.org/10.1111/j.1931-0846.2016.12197.x>.
- Jayanto, D. D. (2019). Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam di Indonesia dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) dan Nahdlatul Ulama (NU). *Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Dan Nahdlatul Ulama (NU)*, 29(1).
- Jones, S. (2002). The Archaeology of Ethnicity. In *The Archaeology of Ethnicity*. <https://doi.org/10.4324/9780203438732>.
- Karapin, R., Betz, H.-G., Hainsworth, P., Kitschelt, H., McGann, A. J., Merkl, P. H., & Weinberg, L. (1998). Radical-Right and Neo-Fascist Political Parties in Western Europe. *Comparative Politics*, 30(2).
<https://doi.org/10.2307/422288>.
- Kazharski, A. (2019). Frontiers of hatred? A study of right-wing populist strategies in Slovakia. *European Politics and Society*, 20(4).
<https://doi.org/10.1080/23745118.2019.1569337>.
- Khan, A. A. (2012). The Role of Social Media and Modern Technology in Arab Spring. *Far East Journal of Psychology and Business*, 7(1).
- Kiftiyah, A. (2019). Upaya Rekonsiliasi Politik Identitas Pasca Pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia. *Jurnal Analis Kebijakan*, 3(1).
- Lacombe, M. J. (2021). Weaponized Group Identities and the Health of Democracy. In *Democratic Resilience*.
<https://doi.org/10.1017/9781108999601.010>.
- Lemley, M. A. (2020). The Splinternet. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3664027>.
- Lemmons, R. (2013). Hitler's rival: Ernst Thälmann in myth and memory. In *Hitler's Rival: Ernst Thälmann in Myth and Memory*.
<https://doi.org/10.1093/gerhis/ghu048>.
- Lundgren, H., & Poell, R. F. (2016). On Critical Reflection: A Review of Mezirow's Theory and Its Operationalization. In *Human Resource Development Review* (Vol. 15, Issue 1).
<https://doi.org/10.1177/1534484315622735>.
- Machlis, E. (2022). Sunni participation in a Shi'i-led Iraq: Identity politics and the road to redefining the national ethos. *Studies in Ethnicity and Nationalism*, 22(1). <https://doi.org/10.1111/sena.12358>.
- Malešević, S. (2006). Identity as ideology: Understanding ethnicity and nationalism. In *Identity as Ideology: Understanding Ethnicity and Nationalism*. <https://doi.org/10.1057/9780230625648>.
- Matsuo, M. (2019). Critical reflection, unlearning, and engagement. *Management Learning*, 50(4).
<https://doi.org/10.1177/1350507619859681>.
- Miller-Idriss, C. (2017). Book Review: Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and Its Threat to Democracy . *The International Journal of Press/Politics*, 22(4).
<https://doi.org/10.1177/1940161217727108>.
- Miranda, C. M., & Soto, G. R. (2021). Movement for the Emancipation of Women in Chile (MEMCH). The Development of comprehensive politics

- and forms of popular education for the recognition of women's rights, 1935-1941. *Trashumante*, 17.
<https://doi.org/10.17533/UDEA.TRAHS.N17A08>.
- Muharam, M. M., Marijan, K., & Kusman, A. P. (2021). Power relation of the 212 Islamic Group and the government in the 2019 presidential election. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 34(3).
<https://doi.org/10.20473/mkp.v34i32021.305-316>.
- Muller, K. (2017). The post-privacy doctrine and the asymmetric symbiosis of firms, consumers and the state. *Proceedings of 4th International Conference on Behavioral, Economic, and Socio-Cultural Computing, BESC 2017*, 2018-January.
<https://doi.org/10.1109/BESC.2017.8256407>.
- Muszynski, A., & Staggenborg, S. (1995). The Pro-Choice Movement: Organization and Activism in the Abortion Conflict. *Canadian Public Policy / Analyse de Politiques*, 21(1). <https://doi.org/10.2307/3552056>.
- Nawir, M., & Mukramin, S. (2019). Identitas Etnis Dalam Ranah Politik. *Phinisi Integration Review*, 2(2).
<https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10090>.
- Nurjaman, A., Suprpto, B., & Masmuh, A. (2018). Nationalist Vs Islamic: The dynamic of politik aliran in post-suharto Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 26(3).
- Pamungkas, C. (2020). *Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia* (C. Pamungkas & Y. S. Permana (eds.)). LIPI Press.
- Pauwels, L. J. R., & Heylen, B. (2020). Perceived Group Threat, Perceived Injustice, and Self-Reported Right-Wing Violence: An Integrative Approach to the Explanation Right-Wing Violence. *Journal of Interpersonal Violence*, 35(21-22).
<https://doi.org/10.1177/0886260517713711>.
- Pauwels, M. (2020). Emancipatory politics between identity and disidentification: Rancière and the black consciousness movement. *Acta Academica*, 52(2). <https://doi.org/10.18820/24150479/aa52i2/2>.
- Prayogi, I. (2019). Populisme Islam dan Imajinasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2).
<https://doi.org/10.32734/politeia.v11i2.1083>.
- Qasim, K. (2012). Black women's quest for subjectivity: Identity politics in Toni Morrison's novels: *Song of Solomon* & *Beloved*. *International Journal of Applied Linguistics and English Literature*, 1(2).
<https://doi.org/10.7575/ijalel.v.1n.2p.85>.
- Ritchie, K. (2021). Does identity politics reinforce oppression? *Philosophers Imprint*, 21(4).
- Rodrik, D. (2021). Why Does Globalization Fuel Populism? Economics, Culture, and the Rise of Right-Wing Populism. In *Annual Review of Economics* (Vol. 13). <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-070220-032416>.
- Romli, L. (2019). Political Identity and Challenges for Democracy Consolidation in Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 4(1). <https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i1.17214>.
- Rosset, P. M., Val, V., Barbosa, L. P., & Mccune, N. (2021). Agroecology and La Via Campesina II. Peasant agroecology schools and the formation of

- a sociohistorical and political subject. *Desenvolvimento e Meio Ambiente*, 58. <https://doi.org/10.5380/dma.v58i0.81357>.
- Sihidi, I. T., Roziqin, A., & Suhermanto, D. F. (2020). Pertarungan Populisme Islam dalam Pemilihan Presiden 2019. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2). <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8516>.
- Simandjuntak, D. (2019). Milk Coffee at 10 Am: Encountering the State Through Pllkada in North Sumatra. In *State of Authority*. <https://doi.org/10.7591/9781501719448-004>.
- Sircar, N. (2020). The politics of vishwas: political mobilization in the 2019 national election. *Contemporary South Asia*, 28(2). <https://doi.org/10.1080/09584935.2020.1765988>.
- Smith-Rosenberg, C. (2012). This violent empire: The birth of an American national identity. In *This Violent Empire: The Birth of an American National Identity*. <https://doi.org/10.5860/choice.48-3484>.
- Stellmacher, J., & Petzel, T. (2005). Authoritarianism as a group phenomenon. *Political Psychology*, 26(2). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2005.00417.x>
- Stryker, S., & Burke, P. J. (2000). The past, present, and future of an identity theory. *Social Psychology Quarterly*, 63(4). <https://doi.org/10.2307/2695840>.
- Suherman, A., Putra, M. R. A., & Mansur. (2020). *Identity Politic Contestation in the Public Sphere: A Steep Road of Democracy in Indonesia*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.046>.
- Supratikno, A. (2022). *Reviewing Identity Politics from Pancasila Democracy*. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315573>.
- Taiwo, A. (2022). Social workers' use of critical reflection. *Journal of Social Work*, 22(2). <https://doi.org/10.1177/14680173211010239>.
- Temby, Q., & Hu, B. (2019). Polarisation on- and off-line in Indonesia's 2019 Presidential Elections. *Perspective ISEAS- Yusof Ishak Institute*, 26.
- Thornton, P. B., & Henderson, M. G. (1997). Borders, Boundaries, and Frames: Essays in Cultural Criticism and Cultural Studies. *The Journal of the Midwest Modern Language Association*, 30(1/2). <https://doi.org/10.2307/1315433>.
- Toha, R. J. (2017). Political Competition and Ethnic Riots in Democratic Transition: A Lesson from Indonesia. *British Journal of Political Science*, 47(3). <https://doi.org/10.1017/S0007123415000423>.
- Toha, R. J., Gueorguiev, D. D., & Sinpeng, A. (2021). The normalization of intolerance: The 2019 presidential election in Indonesia. *Electoral Studies*, 74. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2021.102391>.
- Trivedi, P. K., & Singh, S. S. (2021). Is Politics Going Casteless? A dialogue with Politically Untied Jatis in North India. *Studies in Indian Politics*, 9(1). <https://doi.org/10.1177/2321023021999158>.
- Tucker Carlson. (2003). *Politician, Partisans, dan Parasites* (First eBook Edition). Warner Books, Inc.
- Val, V., Rosset, P. M., Zamora Lomeli, C., Giraldo, O. F., & Rocheleau, D. (2019). Agroecology and La Via Campesina I. The symbolic and material construction of agroecology through the dispositive of "peasant-to-peasant" processes. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 43(7-8). <https://doi.org/10.1080/21683565.2019.1600099>.

- van Alstyne, M., & Brynjolfsson, E. (1996). ELECTRONIC COMMUNITIES: GLOBAL VILLAGES OR CYBERBALKANIZATION? *Proceedings of the 17th International Conference on Information Systems, ICIS 1996*.
- van Bruinessen, M. (2002). Genealogies of Islamic radicalism in post-Suharto Indonesia. *South East Asia Research*, 10(2). <https://doi.org/10.5367/000000002101297035>.
- van Woerkom, M. (2010). Critical reflection as a rationalistic ideal. *Adult Education Quarterly*, 60(4). <https://doi.org/10.1177/0741713609358446>.
- Vargas-Ramos, C. (2007). Review of Latino Politics: Identity, Mobilization, and Representation. *Centro Journal*.
- Walters, S. D. (2018). Currents: Feminist key concepts and controversies in defense of identity politics. *Signs*, 43(2). <https://doi.org/10.1086/693557>
- We Are Social, & HootSuite. (2021). *Digital in Indonesia: All the Statistics You Need in 2021*. Datareportal.Com.
- Weir, A. (2008). Global Feminism and Transformative Identity Politics. *Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy*, 23(4). <https://doi.org/10.2979/hyp.2008.23.4.110>.
- Whaley, J. (2004). Book Review: Black Sun. Aryan Cults, Esoteric Nazism and the Politics of Identity. *Journal of European Studies*, 34(4). <https://doi.org/10.1177/004724410403400418>.
- Whitaker, L., & Reimer, E. (2017). Students' conceptualisations of critical reflection. *Social Work Education*, 36(8). <https://doi.org/10.1080/02615479.2017.1383377>.
- Wiessala, G. (1997). Problems of nationalism, neo-fascism and national identity in post-unification Germany. *Journal of Area Studies*, 5(10). <https://doi.org/10.1080/02613539708455797>.
- Winarni, L. (2014). The political identity of ulama in the 2014 Indonesian presidential election. *Al-Jami'ah*, 52(2), 257-269. <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.522.257-269>.
- Wineinger, C., & Nugent, M. K. (2020). Framing Identity Politics: Right-Wing Women as Strategic Party Actors in the UK and US. *Journal of Women, Politics and Policy*, 41(1). <https://doi.org/10.1080/1554477X.2020.1698214>.
- Yates, C. (2015). Introducing Emotion, Identity and the Play of Political Culture. In *The Play of Political Culture, Emotion and Identity*. https://doi.org/10.1057/9781137319517_1.
- Yousuf, E. A. (2021). Black Immigrants in North America: Essays on Race, Immigration, Identity, Language, Hip-Hop, Pedagogy, and the Politics of Becoming Black. *Teachers College Record*.
- Zahrotunnimah, Z. (2018). Sejarah Politik Identitas dan Nasionalisme di Indonesia. *'ADALAH*, 2(10). <https://doi.org/10.15408/adalah.v2i10.9437>.
- Zilis, M. A. (2022). How Identity Politics Polarizes Rule of Law Opinions. *Political Behavior*, 44(1). <https://doi.org/10.1007/s11109-020-09616-3>.